

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan lapangan dan analisis mengenai pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan proklamasi Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa keberhasilan program kampung iklim di Kelurahan Tugurejo merupakan representasi kemenangan yang diporelasi oleh pemerintah, bukan kemenangan yang diperoleh oleh masyarakat. walaupun Kelurahan Tugurejo berhasil meraih penghargaan tertinggi tingkat nasional, tetapi kesuksesan tersebut diperoleh dengan cara kerja yang satu arah dari bawah ke atas (*top down*). Dominasi yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang tidak hanya sekedar memenuhi fungsi sebagai kepemimpinan, melainkan menjadi aktor tunggal yang menentukan keberlanjutan dan inisiatif program yang ada di tingkat tapak.

Kerjasama yang terjalin lebih merupakan instrumen dari birokrasi untuk dapat mencapai target penghargaan, daripada sebuah transformasi tata kelola lokal yang lebih mandiri. *Collaborative governance* tidak sepenuhnya berlangsung dalam pola interaksi yang setara antar aktor. Meskipun berbagai pemangku kepentingan terlibat dalam pelaksanaan program, tetapi distribusi dan sumber daya yang tidak merata. Selain itu ketimpangan sumber daya dan juga ketiadaan desain kelembagaan yang secara formal melandasi proses kolaborasi telah menjebak kolaborasi ini dalam sebuah siklus yang ketergantungan. Kelurahan Tugurejo yang seharusnya memiliki peran penting, justru menyerahkan kendali sepenuhnya

kepada DLH Kota Semarang dan figur *local hero*. Hal ini menimbulkan kolaborasi yang tidak setara, di mana keterlibatan masyarakat masih pada hal yang berfokus pada mobilisasi tenaga, tanpa dilibatkan pada proses yang substantif. Sehingga keberhasilan kecil yang diraih sifatnya sangat rapuh, dan sangat rentan terhadap guncangan terlebih jika terjadi transisi kepemimpinan atau pergeseran kebijakan dari otoritas yang lebih tinggi.

Sehingga dalam penelitian ini menegaskan bahwa kemajuan dan progress dalam kolaborasi hanya akan menjadi keberhasilan semu jika tidak dibarengi dengan redistribusi kekuasaan dan juga pengetahuan yang merata. Sehingga esensi dari collaborative governance yang ideal bukanlah pada seberapa banyak program yang sudah dijalankan, tetapi kemampuan aktor dalam melakukan kolaborasi tersebut untuk bertahan tanpa adanya otoritas negara ataupun peran aktor lain yang lebih dominan.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil simpulan maka dapat diberikan saran dan masukan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kelurahan Tugurejo : Diharapkan mampu untuk dapat mengambil peran yang lebih proaktif dan tidak hanya sekedar menjadi fasilitator administratif. Pemerintah kelurahan perlu untuk mengalokasikan waktu untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh Proklim Tugurejo agar tidak terjadi kesalahpahaman antar aktor.

2. Bagi DLH Kota Semarang : Perlu untuk dilakukannya pembuatan perjanjian kerja yang formal dan terlembaga dengan baik melalui penyusunan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau perjanjian kerjasama tertulis yang lebih mendetail dengan pihak swasta, hal ini penting dikarenakan dapat digunakan untuk menjamin keberlanjutan dukungan dalam proses kolaborasi.
3. Bagi Pengurus Proklam Tugurejo : Perlu untuk dilakukannya regenerasi kepemimpinan dan kepengurusan Proklam Tugurejo sejak dini, dikarenakan peran *local hero* yang terlalu dominan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada aktor tertentu. Selain itu juga, pengurus perlu untuk memperluas peningkatan edukasi kepada warga umum secara keseluruhan, agar keterlibatan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memahami esensi dari proklam terlebih terkait aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
4. Bagi Peneliti selanjutnya : Bagi peneliti selanjutnya mengingat penelitian ini terbatas pada perspektif *collaborative governance*, peneliti selanjutnya dapat melihat dari sisi ekonomi sirkular atau ketahanan sosial masyarakat setelah meraih penghargaan sebagai proklam lestari.